

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019



Laksamana Yos Sudarso

Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018

e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laksamana Yos Sudarso
Telp. 21018 Fax. 21018
Bone - Sulawesi Selatan 92715
e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bone, 5 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi
NIP.197412142006041002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
C.1. Aset Lancar	37
C.2. Aset Tetap	38
C.3. Aset Lainnya	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.6. Ekuitas	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	44

D.2.	Beban Pegawai	44
D.3.	Beban Persediaan	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa	45
D.5.	Beban Pemeliharaan	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
D.8.	Kegiatan Non Operasional	48
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
E.1.	Ekuitas Awal	48
E.2.	Surplus (defisit) LO	48
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	48
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	49
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	49
E.3.	Ekuitas Akhir.....	50
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	50
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	50
	Laporan-laporan Pendukung.....	53
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	54

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019.....	33
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019 dan 2018	33
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019	34
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019.....	34
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	35
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	35
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	36
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	37
Tabel 11 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Watampone

Laksamana Yos Sudarso Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018 e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bone, 5 Agustus 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi

NIP.197412142006041002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6,587,444 atau mencapai 76,07 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp8.660.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp5.510.622.063 atau mencapai 59,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.290.795.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	10.923.000	4.745.595	43,44	6.587.444
Belanja Negara	12.914.434.000	6.340.277.893	49.09	5.510.622.063

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.623.854.257 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp25.074.250; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.534.373.099; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesian piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp25.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp11.623.854.257, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp25.000.000 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp11.598.854.257.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2019	2018	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	25.074.250	611.000	24.463.250	4.003,80
Aset Tetap	11.534.373.099	11.752.793.910	(218.420.811)	(1,85)
Aset Lainnya	64.406.908	0	64.406.908	0,00
Jumlah Aset	11.623.854.257	11.753.404.910	(129.550.653)	(1,10)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	25.000.000	16.920.241	8.079.759	47,75
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	25.000.000	16.920.241	8.079.759	47,75
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	11.598.854.257	11.736.484.669	(137.630.412)	(1,17)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	11.598.854.257	11.736.484.669	(137.630.412)	(1,17)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	11.623.854.257	11.753.404.910	(129.550.653)	(1,10)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp4.745.544, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.477.901.805 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.473.156.261) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp(6.449) dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(6.473.162.710)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp11.736.484.669 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(1.473.162.710) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.335.532.298 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp11.598.854.257

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	10.923.000	4.745.595	43,45	6.587.444
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		10.923.000	4.745.595	43,45	6.587.444
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	11.877.915.000	6.042.837.834	50,87	4.902.391.069
2.	Belanja Barang	B.2.2.	863.519.000	293.440.059	33,98	440.260.994
3.	Belanja Modal	B.2.3.	173.000.000	4.000.000	2,31	167.970.000
	Jumlah Belanja Negara		12.914.434.000	6.340.277.893	49,09	5.510.622.063

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	25.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	74.250	611.000
Jumlah Aset Lancar		25.074.250	611.000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	5,238,828,000	5,238,828,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.955.071.028	1.951.071.028
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.108.560.000	6,175,578,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	19,988,100	19,988,100
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	14,997,470	14,997,470
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.803.071.499)	(1.647.668.688)
Jumlah Aset Tetap		11.534.373.099	11.752.793.910
Aset Lainnya	C.4		
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	120.263.000	53.245.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(55.856.092)	(53.245.000)
Jumlah Aset Lainnya		64.406.908	0
Jumlah Aset		11.623.854.257	11.753.404.910
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	16.920.241
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	25.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.000.000	16.920.241

Jumlah Kewajiban		25.000.000	16.920.241
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar		C.6	
Jumlah Ekuitas Dana		11.598.854.257	11.736.484.669
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		11.623.854.257	11.753.404.910

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	4.745.544	6.587.318
Jumlah Pendapatan		4.745.544	6.587.318
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	6.037.000.101	4,882,401,066
Beban Persediaan	D. 3	9.977.750	19,815,600
Beban Barang dan Jasa	D. 4	203.544.351	184,880,877
Beban Pemeliharaan	D. 5	37.634.600	198,155,590
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	31.731.100	28.443.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	158.013.903	165.683.458
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		6.477.901.805	5.479.379.591
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.473.156.261)	5.472.792.273)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6.449)	(358.774)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(6.449)	(358.774)

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.473.162.710)	(5.473.151.047)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	E. 1	11.736.484.669	5,752,765,756
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(6.473.162.710)	(5.473.151.047))
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	5,465,652,780
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	307.157.000
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	6.335.532.298	5,504,034,619
Ekuitas Akhir		11.598.854.257	11.556.459.108

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah : MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG

Misi Pengadilan Agama Watampone adalah

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076.
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi.
- 10) Percepatan penyelesaian perkara
- 11) Penyelesaian sisa perkara
- 12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu

14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP)
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris/BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.
- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola
- 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
- 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNPB, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.
- 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN.
- 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia.
- 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
- 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2020 secara tepat waktu.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang		
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp6.587.595*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp6.587.595 atau mencapai 76,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.923.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.923.000	4.745.544	43,44
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		10.923.000	4.745.595	43,44

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.(1.841.849) atau (27,96) persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena Menurunnya Tidak adanya Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.745.544	2.846.758	1.898.786	66,70
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	51	126	(75)	(59,52)
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3.740.560	(3.740.560)	0,00
Total Pendapatan		4.745.595	6.587.444	(1.842.849)	(27,96)

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp
6.340.277.893*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2019 adalah

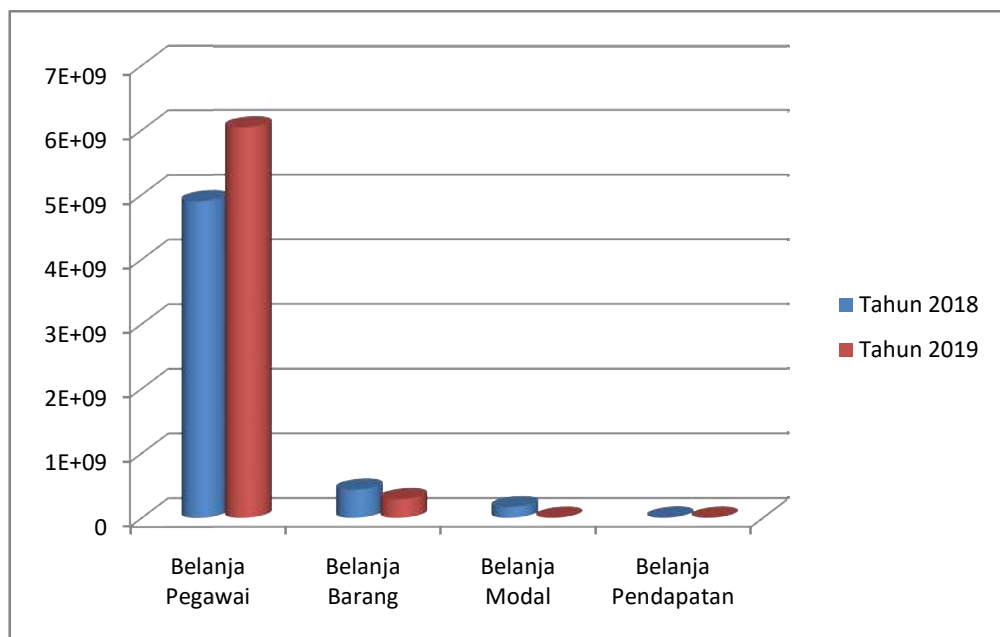
sebesar Rp6.340.277.893 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49,09% dari anggaran senilai Rp12.914.434.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.877.915.000	6.042.837.834	50,87
Belanja Barang	863.519.000	193.440.059	33,98
Belanja Modal	173.000.000	4.000.000	2,31
Total Belanja Bruto	12.914.434.000	6.340.277.893	49,09
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	12.914.434.000	6.340.277.893	49,09

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.829.655.830 atau sebesar 15,06 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebanyak 7 orang
2. Adanya kenaikan pangkat PNS

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	6.042.837.834	4.902.391.069	1.140.446.765	23,26
Belanja Barang	293.440.059	440.260.994	(146.820.935)	(33,35)
Belanja Modal	4.000.000	167.970.000	(163.970.000)	(97,62)
Total Belanja	6.340.277.893	5.510.622.063	829.655.830	15,06

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
6.042.837.834*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp6.042.837.834 dan Rp4.902.391.069.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,26 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebanyak 7 orang;
2. Adanya kenaikan pangkat PNS

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.534.859.180	1.311.955.900	222.903.280	16,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.385	13.954	4.431	31,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.126.080	96.315.980	18.810.100	19,52
Beban Tunj. Anak PNS	31.941.378	29.052.120	2.889.258	9,94
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	20.160.000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.374.740.000	2.642.635.000	732.105.000	27,70
Beban Tunj. PPh PNS	514.954.398	385.667.432	129.286.966	33,52
Beban Tunj. Beras PNS	58.225.680	54.604.680	3.621.000	6,63

Beban Uang Makan PNS	177.040.000	177.776.000	(736.000)	(0,41)
Beban Tunjangan Umum PNS	2.035.000	2.220.000	(185.000)	(8,33)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	207.900.000	162.000.000	45.900.000	28,33
Total Belanja Brutto	6.037.000.101	4.882.401.066	1.154.599.035	23,64
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	6.037.000.101	4.882.401.066	1.154.599.035	23,64

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
Rp293.440.059

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp293.440.059 dan Rp440.260.994.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 29 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pemeliharaan gedung yang sementara proses dan belum terealisasi.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	182.003.500	155.047.842	26.955.658	17
Belanja Barang Non Operasional	9.265.000	1.016.100	8.248.900	812
Belanja Jasa	42.595.859	37.272.562	5.323.297	14
Belanja Pemeliharaan	37.109.600	194.145.490	(157.035.890)	(81)
Belanja Perjalanan Dinas	22.466.100	28.443.000	(5.976.900)	(21)
Total Belanja Brutto	293.440.059	415.924.994	(122.484.935)	(29)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	293.440.059	415.924.994	(122.484.935)	(29)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp4.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp4.000.000 dan Rp167.970.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar 98 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan karena Pada Semester I Tahun 2019 Belanja Modal Alat Pengolah data dan Komunikasi Pendukung SIPP, sementara dalam proses.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	4.000.000	167.970.000	(163.970.000)	(98)
Total Belanja Brutto	4.000.000	167.970.000	(163.970.000)	(98)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	4.000.000	167.970.000	(163.970.000)	(98)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
25.074.250,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.074.250 dan Rp. 611.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	611.000
Persediaan	74.250	0
Total Aset Lancar	41.254.800	611.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp25.074.250

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp25.074.250 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Tunai di Brandkas	19.624.500	0
2.	Uang di Rek. Bank	0	0
3.	Kuitansi UP	5.375.500	0
	Jumlah	25.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp74.250*

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp74.250 dan Rp611.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	74.250	74.250
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	74.250	74.250

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
11.534.373.099*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp11.534.373.099 dan Rp11.752.793.910. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	5,238,828,000	5,238,828,000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.955.071.028	1.951.071.028	4.000.000
3	Gedung dan Bangunan	6.108.560.000	6,175,578,000	(67.018.000)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19,988,100	19.988.100	0
5	Aset Tetap Lainnya	14,997,470	14,997,470	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	13.337.384.598	13.400.462.598	(63.018.000)
	Akumulasi Penyusutan	(1.803.071.499)	(1.647.668.688)	(155.402.811)
	Nilai Buku Aset Tetap	11,898,654,308	11.752.793.910	(218.420.811)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp5,238,828,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5,238,828,000 dan Rp5,238,828,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.308	14/1982	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Negara Gol. II	1.406.704.000
2.	2	3.424	13/2014	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Bangunan Kantor Pemerintah	3.832.124.000
Jumlah						5.238.828.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :*
Rp1.955.071.028

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.955.071.028 dan Rp1.951.071.028

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	1.951.071.028
Mutasi Tambah	
Pembelian	4.000.000
Mutasi Kurang	
Penghentian BMN dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2019	1.955.071.028
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(1.577.472.316)
Nilai Buku 30 Juni 2019	377.598.712

Nilai tambahan perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Mesin Absensi	1	Unit	4.000,000	4.000.000
J U M L A H					4.000.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp6.108.560.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp6,108.560,000 dan Rp6,175,578,000

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	6.175.578.000
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari penggunaan	(67.018.000)
Saldo per 30 Juni 2019	6.108.560.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(223.850.226)
Nilai Buku 31 Desember 2018	5.884.709.774

Mutasi Gedung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adanya Penghentian Aset dari Penggunaan karena Kondisi Rusak Berat akibat Banjir

berupa Pagar Permanen yang terletak di Rumah Dinas kantor Pengadilan Agama Watampone.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp19.988.100*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp19.988.100 dan Rp19.988.100.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	19.988.100
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2018	19.988.100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	1.249.255
Nilai Buku 31 Desember 2018	18.738.845

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp14.997.470*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.997.470 dan Rp14.997.470.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.997.470.

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada tahun 2019

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(1.803.071.499)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(1.803.071.499) dan Rp(1.647.668.688).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.955.071.028	1.577.472.316	377.598.712
2	Gedung dan Bangunan	6.108.560.000	223.850.226	5.884.709.774
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19.988.100	1.748.957	18.239.143
4	Aset Tetap Lainnya	14.997.470	0	14.997.470
Jumlah		8.098.616.598	1.803.071.499	6.295.545.099

*Aset Lainnya:
Rp64.406.908*

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp64.406.908 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	120.263.000	53.245.000
Nilai perolehan Aset Lainnya		120.263.000	53.245.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(55.856.092)	(53.245.000)
Nilai buku Aset Lainnya		64.406.908	0

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 120.263.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp64.406.908 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Watampone serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	53.245.000
Mutasi Tambah	67.018.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	120.263.000

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Watampone berupa

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Mesin Absensi	1	Buah	24.975.000	24.975.000
2.	Lap Top	2	Buah	11.000.000	22.000.000
3.	Lap Top	1	Buah	6.270.000	6.270.000
4.	Pagar permanen	1	Unit	67.018.000	67.018.000
J U M L A H					120.263.000

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp25.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp25.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
11.598.854.257*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.598.854.257 dan Rp11.736.484.669. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp4.745.544

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp4.745.544 dan Rp6.587.318. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.923.000	4.745.544	43,44
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Total Pendapatan		10.923.000	4.745.595	43,44

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
6.037.000.101

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.037.000.101 dan Rp4.882.401.066. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.534.859.180	1.311.955.900	222.903.280	16,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.385	13.954	4.431	31,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.126.080	96.315.980	18.810.100	19,52
Beban Tunj. Anak PNS	31.941.378	29.052.120	2.889.258	9,94
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	20.160.000	0	
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.374.740.000	2.642.635.000	732.105.000	27,70
Beban Tunj. PPh PNS	514.954.398	385.667.432	129.286.966	33,52
Beban Tunj. Beras PNS	58.225.680	54.604.680	3.621.000	6,63
Beban Uang Makan PNS	177.040.000	177.776.000	(736.000)	(0,41)
Beban Tunjangan Umum PNS	2.035.000	2.220.000	(185.000)	(8,33)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	207.900.000	162.000.000	45.900.000	28,33
Total Beban Pegawai	6.037.000.101	4.882.401.066	1.640.092.852	23,64

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp9.977.750*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.977.750 dan Rp19.815.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	9.977.750	19.815.600	(9.837.850)	(49,64)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	9.977.750	19.815.600	(9.837.850)	(49,65)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
203.544.351*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp203.544.351 dan Rp184.880.877. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	127.199.000	112.573.542	14.625.458	12,99
Beban Jasa Pos dan Giro	463.500	685.500	(222.000)	(32,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.150.000	24.150.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	15.909.000	16.725.000	(816.000)	(4,87)
Beban Bahan	0	1.016.100	(1.016.100)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	30.617.682	25.281.488	5.336.194	21,10
Beban Langganan Telepon	598.669	622.747	(24.078)	(3,86)
Beban Langganan Air	4.606.500	3.826.500	780.000	20,38
Total Beban Jasa	203.544.351	184.880.877	18.663.474	10,09

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp37.634.600*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp37.634.600 dan Rp198.155.590. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.416.000	148.147.300	(140.731.300)	(94,99)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.693.600	45.998.190	(16.304.590)	(35,44)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	525.000	4.010.100	(3.485.100)	(86,90)
Total Beban Pemeliharaan	37.634.600	198.155.590	44.967.290	(81,01)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp31.731.100*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31.731.100 dan Rp28.443.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	31.731.100	28.443.000	(3.288.100)	11,56
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	31.731.000	28.443.000	(3.288.100)	11,56

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp158.013.903*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp158.013.903 dan Rp165.683.458. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	82.276.946	93.409.051	(11.132.105)	(11,91)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.616.742	72.024.556	2.592.186	3,59
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	249.851	249.851	0	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional pemerintahan	870.364	0	870.364	0,00
Jumlah Penyusutan	158.013.903	165.683.458	(7.669.555)	(4,62)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.013.903	165.683.458	(7.669.555)	(4,62)

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp(6.449)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	51	126	(75)	(59,52)
Pendapatan Penyesuaian Nilai	14.000	0	14.000	0
Persediaan				
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	20.500	358.900	(338.400)	(94,29)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(6.449)	(358.774)	352.325	(98,20)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.736.484.669 dan Rp5.752.765.756

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(6.473.162.710) dan Rp(5.476.956.047) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019

dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 5.465.652.780. Revaluasi Aset tersebut berasal dari Tanah dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Watampone.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.307.157.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai akan tetapi berasal dari Barang berlebih.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.335.532.296 dan Rp5.504.034.619

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.745.595)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.340.277.893
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	6.335.532.298

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp(4.745.595) sedangkan DKEL sebesar Rp6.340.277.893

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.598.854.257 dan Rp11.556.459.108.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK periode laporan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat Belanja Langganan Internet sebesar Rp.4.309.500,- yang seharusnya dibayarkan pada akhir Desember, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019.
2. Terdapat Belanja Langganan Daya Listrik sebesar Rp.5.722.088,- yang seharusnya dibayarkan pada akhir Desember, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019;
3. Terdapat Belanja Langganan Telepon sebesar Rp.80.820,- yang seharusnya dibayarkan pada akhir Desember, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
4. Terdapat Belanja Langganan Air sebesar Rp.970.100,- yang seharusnya dibayarkan pada akhir Desember, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
5. Terdapat Kekurangan Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 1.393.800 yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
6. Terdapat Kekurangan Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp.43 yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
7. Terdapat Kekurangan Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS sebesar Rp.139.380 yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019

8. Terdapat Kekurangan Belanja Tunjangan Anak PNS sebesar Rp.55.752,- yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
9. Terdapat Kekurangan Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp.3.600.000,- yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019
10. Terdapat Kekurangan Belanja Tunjangan Anak PNS sebesar Rp.648.758,- yang seharusnya dibayarkan pada Tahun 2018, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:

1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.359.647.500.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal. III DIPA) pada Triwulan I dan Triwulan II
2. Revisi POK yang tidak mengalami pergeseran Akun.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Laporan Semester I Tahun 2019.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI., Nomor 55/PA/SK/XII/2018 Tanggal : 3 Desember Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen	: Nurhidayah, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Maftukhah Mustafa, S.Kom
Bendahara	: Heriawati, SH

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Watampone
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 JUNI TAHUN 2019

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2019	Tahun 2019	Per 30-06-2019	Per 31-12-2016
A	Tanah						
1	Tanah	-	5.238.828.000	-	-	-	5.238.828.000
	Jumlah		5.238.828.000	-	-	-	5.238.828.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	455.024.828	455.024.828	-	455.024.828	-
2	Alat Kantor	5	234.493.200	167.274.740	13.279.820	180.554.560	53.938.640
3	Alat Rumah Tangga	5	627.649.800	481.771.652	22.838.725	504.610.377	123.039.423
4	Alat Studio	5	24.995.000	12.995.000	2.000.000	14.995.000	
5	Alat Komunikasi	5	25.345.000	25.345.000	-	25.345.000	-
6	Peralatan Pemancar	5	149.985.000	44.995.500	7.499.250	52.494.750	97.490.250
7	Komputer Unit	4	307.661.000	190.496.375	31.283.876	221.780.251	85.880.749
8	Peralatan Komputer	4	129.917.200	117.292.275	5.375.275	122.667.550	7.249.650
	Jumlah		1.955.071.028	1.495.195.370	82.276.946	1.577.472.316	377.598.712
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.521.645.000	111.883.750	55.941.875	167.825.625	4.353.819.375
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.371.092.000	31.885.860	15.942.930	47.828.790	1.323.263.210
3	Tugu/Tanda Batas	50	215.823.000	5.463.874	2.731.937	8.195.811	207.627.189
	Jumlah		6.108.560.000	149.233.484	74.616.742	223.850.226	5.884.709.774
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	19.988.100	1.499.106	249.851	1.748.957	18.239.143
	Jumlah		19.988.100	1.499.106	249.851	1.748.957	18.239.143
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	0	-	-	-	-
	Jumlah		0				-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	4	0	-	-	-	-
2		-		-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
G	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	5	24.975.000	24.975.000	-	24.975.000	-
2	Komputer Unit	4	28.270.000	28.270.000	-	28.270.000	-
3.	Tugu/Tanda Batas	50	67.018.000	1.740.728	870.364	2.611.092	64.406.908
	Jumlah		120.263.000	54.985.728	870.364	55.856.092	64.406.908
Total			8.203.882.128	1.700.913.688	158.013.903	1.858.927.591	6.344.954.537